

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Law's function managing the problem the complexity and contingency of expereince, (fungsi hukum antara lain mengatur kompleksitas masalah dan pengalaman kejadian yang terjadi di masyarakat).¹ Pendapat Samford Charlles, yang dikutip oleh Artidjo Alkautsar tersebut, merefleksikan kita, bahwa kedudukan hukum merupakan suatu himpunan aturan yang mengatur kompleksitas, yang diwarnai oleh kompleksnya pengalaman-pengalaman hukum itu sendiri. Ketika melihat kembali jarum sejarah berjalannya hukum, hukum selalu dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang cukup sulit. Kesulitan tersebut, salah satunya tergambar dalam aspek pemeberantasan tindak pidana yang harus mengenyampingkan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, salah satunya tindakan penyadapan. Tidak dapat dipungkiri, aspek kemanfaatan dari penyadapan, yakni mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan, tetapi di waktu yang bersamaan, penyadapan adalah tindakan yang mengenyampingkan hak dasar manusia, khususnya *right of privacy*.²

Penyadapan atau intersepsi pada dasarnya adalah gangguan terhadap komunikasi yang melanggar hak asasi manusia, khususnya *right of privacy* seseorang dalam berkomunikasi. Pengertian penyadapan dimuat dalam beberapa

¹ Sampfor, Charlles, dalam Artidjo Alkautsar, 2015. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta. UII Press. Hlm. 27

² Lihat Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Undang-Undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), disebutkan bahwa:

intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.³

Penyadapan merupakan bagian dari *criminal policy*, Peter Hoefnagels yang dikutip oleh Mokhammad Najih menjelaskan, *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime* (politik hukum pidana adalah bentuk reaksi sosial terhadap kejahatan yang terorganisasi secara rasional).⁴

Reaksi tersebut muncul disebabkan oleh berkembangnya modus tindak pidana yang dilakukan secara individu atau terorganisir. Maka tepat, jika pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden)⁵ memilih penyadapan sebagai *criminal policy* untuk merespon optimalnya pemberantasan tindak pidana. Pada aspek filsafat hukum, tindakan penyadapan yang berlandaskan pada Undang-Undang, merupakan respon hukum terhadap berkembangnya zaman. Bernard Arief Shidarta menjelaskan, bahwa hukum terbentuk oleh dan di dalam sejarah serta menjalani proses yang menyejarah. Sehingga sistem hukum yang terbentuk di

³ Lihat Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴ Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum..* Malang, Setara Press. Hlm. 17

⁵ Lihat pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalamnya itu dengan sendirinya merupakan sistem terbuka yang dinamis.⁶ Bernard L. Tanya juga menjelaskan, bahwa hukum merupakan dokumen manusia historis, yang mencerminkan jejak pergulatan manusia historis. Artinya hukum pada suatu era, akan memicu pemikiran hukum yang lahir di era selanjutnya.⁷

Tindakan penyadapan dianggap sebagai suatu strategi jitu untuk membongkar tindak pidana, contohnya dalam hal tindak pidana korupsi.⁸ tindak pidana yang kerap menjadi objek penyadapan adalah tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir, bahkan ada pula tindak pidana yang sudah di *claim* sebagai *extra ordinary crime*. Penulis menghimpun beberapa regulasi yang memberi kewenangan penyadapan bagi aparat penegak hukum, yakni sebagai berikut:

Tabel 1:
Beberapa regulasi yang memberi kewenangan penyadapan bagi aparat penegak hukum

No	Undang-Undang	Pasal	Bunyi Pasal
1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	430 (2)	Pidana yang dijatuhkan kepada pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, meberi keterangan kepadanya tentang suatu percakapan yang dilakukan oleh perantaraan lembaga itu

⁶ Bernar Arief Shidarta, 2014, *Penemuan Hukum dalam Kajian Filsafat Hukum*. Yogyakarta, Genta Publishing. Hlm. 23

⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hlm. 221

⁸ Puteri Hikmawati, 2015, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Jakarta. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Hlm. 6

2	Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika	55 huruf c	Penyidik Polri dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau di duga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu untuk penyadapan paling lama berlangsung paling lama 30 hari.
3	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	42	<p>(2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas : a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁹</p>
4	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	26	<p>Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Pasal 26 Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (<i>wiretapping</i>)</p>
5	Undang-Undang Nomor	12	(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006. Bahwa pembatasan HAM melalui penyadapan harus diatur dengan Undang-Undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar HAM., bukan dengan Peraturan Pemerintah

	20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi		dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
6	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002	31 ayat (1) huruf b	(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: <ul style="list-style-type: none"> a) membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; b) menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
7	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	31 ayat (1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. 2. Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
8	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	31 ayat (1)	intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi
9	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	75 huruf i	Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: <ul style="list-style-type: none"> i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

			<p>Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;</p> <p>penjelasan :</p> <p>Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging); b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (bird dog); c. intersepsi internet; d. d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax; e. CCTV (Close Circuit Television); f. pelacak lokasi tersangka (direction finder). <p>Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.</p>
		77	<p>1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan</p>

			<p>setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. 3. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	28 ayat (1)	Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11	Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	7	<p>Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan.</p>
12	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	44 ayat (1)	<p>Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan

			ketentuan peraturan perundang-undangan;
13	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	20	<p>3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.</p> <p>4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>

Tindakan penyadapan, sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan tindakan yang dilarang, namun tindakan tersebut akan menjadi tindakan yang tidak dilarang apabila ada Undang-Undang yang memberi justifikasi bagi aparat untuk dapat melakukan tindakan tersebut.¹⁰ Joseph Raz, menjelaskan bahwa justifikasi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk otorisasi hukum atas tindakan yang akan dilakukan oleh negara.¹¹ Pada wilayah ketatanegaraan, hal tersebut juga dapat dibenarkan dengan prasyarat adanya *due*

¹⁰ Reda Manthovani, 2016, *Penyadapan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Kemang. Hlm. 453

¹¹ *Ibid.* Hlm. 454

procces of law, Jimly Ashhidqie menjelaskan bahwa *due procces of law* adalah segala tindak tanduk pemerintahan yang harus di dasarkan pada hukum tertulis, dimana hukum tertulis itu harus ada terlebih dahulu sebelum tindakan administrasi dilakukan.¹² Apabila terdapat tindakan penyalahgunaan tanpa di dasarkan pada suatu aturan hukum, secara *argumentum a contrario* maka tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, menjustifikasi bahwa tindakan penyalahgunaan tanpa melalui dasar hukum dan prosedur yang jelas, maka tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti di persidangan.¹³ Pentingnya adanya suatu prosedur yang ketat dalam setiap tindakan penyalahgunaan, merupakan bentuk dari pembatasan kekuasaan untuk para aparat penegak hukum. Pembatasan tersebut dilakukan dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan penguasa, dan sebagai penghargaan terhadap hak dasar yang dimiliki seseorang. Adnan Buyung Nasution berpendapat, apa pun sistem kemasyarakatan yang dianut suatu negara, hak-hak dan martabat kemanusiaan orang perorangan yang hidup di dalam masyarakat itu harus dihormati dan dijamin, supaya manusia itu tetap utuh harkat dan martabat kemanusiaannya.¹⁴

Secara penegakan, tidak muncul problematika yang signifikan, karena setiap penegakan hukum selalu bersandar pada perintah Undang-Undang. Namun, dalam hal ini penulis menyoroti permasalahan yang muncul dalam tararan regulasi.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 128

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hal. 97-98

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, 2011, *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta. Kompas. Hlm.9

Jika kita cermati, telah terjadi ke khilafan pembentuk Undang-Undang dalam menyusun regulasi penyadapan, karena adanya *incosistency* (tidak konsisten) dan, *uncertainty* (ketidak pastian pengukuran) dalam regulasi penyadapan. *Incossistency* tergambar ketika ada perbedaan permulaan tindakan penyadapan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana terorisme, perdagangan orang, dan narkoba yang terlebih dahulu membutuhkan izin pengadilan untuk melakukan penyadapan. Lain hal nya dengan tindak pidana korupsi yang tidak membutuhkan izin pengadilan terlebih dahulu untuk melakukan penyadapan. Aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK, pelaksanaan penyadapan hanya di dasarkan pada SOP masing-masing instansi.¹⁵ *Uncertainty* tergambar ketika adanya ketidakpastian hukum dalam melakukan penyadapan, dalam tindak pidana terorisme, perdagangan orang dan narkoba, dipersyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup,¹⁶ dan ketentuan ini tercantum secaa *expresise verbis* dalam Undang-Undang *a quo*. Lain hal nya dengan tindak pidana korupsi, yang dalam tindakan penyadapan, tidak tercantum dalam Undang-Undang untuk adanya bukti permulaan yang cukup. Beragamnya otorisasi tindakan penyadapan menyebabkan

¹⁵ Lihat pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 11/PERM.KOMINFO./02/2006 Tentang teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Dalam pasal tersebut menjelaskan, bahwa penyadapan dilakukan berdasarkan SOP yang ditetapkan yang ditetapkan aparat penegak hukum dan diberitahukan secara tertulis kepada direktoral jenderal KOMINFO.

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

perbedaan perlakuan proses hukum dan hal tersebut melanggar prinsip *equality before the law*.¹⁷

Terlebih lagi, *incosistency* dan *uncertainty* juga berimplikasi pada adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mengamanatkan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Hak konstitusional warga negara, tidak berlaku mutlak, karena setiap hak yang dimiliki dapat dibatasi. Pembatasan tersebut haruslah dibatasi dengan Undang-Undang, jika kita menggunakan penafsiran sistematis, maka kita merujuk pada pasal 28J ayat (2) yang mengamanatkan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, memberikan pertimbangan dengan konsisten. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-I/2006, dan Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, ketiga putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan hak asasi manusia, dimana

¹⁷ Lihat pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”

pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang. Undang-Undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan itu baru dapat dimulai setelah ada dua bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup.¹⁸

Putusan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pembentuk Undang-Undang untuk membenahi regulasi penyadapan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penulis mendapatkan 3 alternatif yang muncul ke dalam diskursus publik dalam hal pembenahan tersebut, pertama, yakni dengan membentuk Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai penyadapan, kedua, adanya penyeragaman izin penyadapan melalui pengadilan, dan ketiga, khusus dalam hal tindak pidana korupsi, dibentuk dewan pengawas yang kemudian memberikan izin bagi KPK dalam melakukan penyadapan.¹⁹ Khusus untuk KPK, terdapat perubahan keinginan pembentuk Undang-Undang, karena jika kita cermati draft revisi Undang-Undang KPK yang beredar di tahun 2012, mekanisme penyadapan bukan melalui dewan pengawas, melainkan izin pengadilan.²⁰

¹⁸ *Op.Cit.* Renda Mantovani. Hlm 458

¹⁹ Lihat pasal 12A draft usulan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2015 dan 2016

²⁰ Lihat pasal 12A draft usulan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2012.

Pada tulisan ini, penulis akan melakukan penelitian, yang berorientasi pada rekonstruksi terhadap tindakan penyadapan. Adapun bentuk rekonstruksi yang dimaksud, akan di dahului dengan melakukan analisa terhadap dua alternatif utama dalam tindakan penyadapan, dua alternatif tersebut yakni, pertama: tindakan penyadapan terlebih dahulu dilakukan setelah adanya izin melalui dewan pengawas (untuk tindak pidana korupsi), sedangkan tindak pidana lainnya melalui izin pengadilan. Kedua, tindakan penyadapan untuk seluruh tindak pidana, dilakukan setelah adanya izin pengadilan (tanpa ada spesifikasi terhadap tindak pidana korupsi). Setelah melakukan analisa terhadap kedua bentuk alternatif tersebut, maka penulis akan mengambil satu pilihan terbaik dari kedua tersebut. Pilihan tersebut, tentu saja akan dipilih berdasarkan pertimbangan filosofi, yuridis, empiris dan teori hukum. inilah bentuk rekonstruksi tindakan penyadapan di masa mendatang.

Pentingnya mekanisme izin dalam tindakan penyadapan, merupakan bentuk pengawasan terhadap kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum, karena penyadapan merupakan pengenyampingan terhadap hak dasar seseorang, sehingga dibutuhkan adanya suatu izin. Bagir manan yang dikutip oleh Ridwan HR, menjelaskan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²¹ Adanya mekanisme izin sebelum tindakan penyadapan, dibuat untuk mempertahankan kepentingan

²¹ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 207

perlindungan atas hak individu yang alamiah dan sah. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang dijelaskan oleh Claude Frederic Bastiat, bahwa hukum adalah organisasi hak alamiah pertahanan diri yang sah. Ia adalah suatu kekuatan bersama pengganti kekuatan-kekuatan individu. Dan bagaimana hak individu yang alamiah dan sah, kekuatan bersama ini seharusnya hanya boleh dipakai untuk melindungi kedirian, kebebasan dan hak miliki; untuk memelihara hak masing-masing individu, dan menjadikan keadilan berdaulat atas kita semua.²²

Melihat uraian yang telah penulis jabarkan dalam latar belakang ini, maka penulis hendak melakukan penelitian untuk menemukan pendapat hukum adanya izin sebelum penyadapan, dalam hal ini penulis akan menganalisa melalui hak konstiusional, khususnya *right of privacy*. Kemudian, penulis akan melakukan penelitian mengenai *design* pelebagaan yang ideal, apakah tindakan penyadapan dalam “seluruh” lapangan tindak pidana harus dilakukan terlebih dahulu melalui izin pengadilan, atau terdapat pengkhususan bagi tindak pidana korupsi hanya melalui dewan pengawas. Pada akhir tulisan ini, penulis juga akan memberikan saran dan rekomendasi yang hendaknya dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang ideal, bermartabat, dan menjunjung tinggi hak konstiusional warga negara. Adapun judul yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah **“REKONSTRUKSI TINDAKAN PENYADAPAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Ditinjau Melalui Prinsip Negara Hukum dan Hak Konstiusional Warga Negara)”**

²² Claude Frederic Bastiat, 2010, *Hukum Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka*. Jakarta. Freedom Institute dan Akademi Merdeka. Hlm.2

B. Rumusan Permasalahan

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, adapun perumusan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis atas tindakan dan izin penyadapan, ditinjau dari prinsip negara hukum dan hak Konstitusional warga negara?
2. Bagaimana bentuk konstruksi ideal regulasi penyadapan dalam penegakan hukum di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini ialah:

1. Untuk memahami dan mengetahui tinjauan yuridis tindakan dan izin penyadapan sebelum melakukan tindakan penyadapan;
2. Untuk menemukan konstruksi ideal regulasi penyadapan dalam penegakan hukum di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Secara objektif, penelitian ini dapat memberikan dan meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait penyadapan yang bersinggungan dengan bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum tata negara

yang keseluruhannya bersumber pada konstitusi. Di samping itu, manfaat penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk Penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi S-rata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai penyadapan dalam perspektif hukum pidana, acara pidana, dan tata negara yang keseluruhannya bersumber pada konstitusi.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi para penegak hukum, untuk lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan, khususnya yang bersinggungan dengan hak konstitusional warga negara.

d. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pijakan untuk membentuk regulasi yang bersukamakan keadilan dan sesuai dengan semangat konstitusi. Sehingga pembentuk undang-undang mampu menciptakan regulasi yang bersifat strategis dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur bagi masyarakat agar sadar dengan hukum dan hak-hak yang diberikan oleh hukum. sehingga masyarakat mampu menjadi penyeimbang kekuasaan para penegak hukum.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menemukan alasan-alasan adanya suatu izin penyadapan dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu kegunaan penelitian ini untuk memahami konsep kedudukan *right of privacy* dalam penegakan hukum di Indonesia. Lebih lanjut penelitian ini berguna untuk menemukan design ideal dalam hal pelebagaan izin penyadapan, sehingga berguna untuk *ius constituendum* di Indonesia.

F. Metode Penulisan

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²³ Pertama, menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini diterapkan karena akan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

kemudian memunculkan gagasan baru. Pilihan pendekatan ini dilakukan karena orientasi hasil penelitian adalah untuk memperoleh untuk memperoleh hubungan antara tindakan penyadapan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, serta bentuk rekonstruksi dari tindakan penyadapan di masa mendatang

2. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum penulisan hukum ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer²⁴ meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

²⁴ Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 116. Bambang mengemukakan bahwa bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari, 1). Norma atau kaidah dasar pembukaan UUD 1945. 2). Peraturan dasar yaitu UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 3). Peraturan perundang-undangan. 4). Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat. 5). Yurisprudensi. 5). Traktat. 7). Bahan hukum dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum tersier: merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (*library research*). Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,²⁵ yakni

²⁵ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, halaman 392

penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan perbandingan antara GBHN dan RPJPN. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.